

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Berbagai bidang kemasyarakatan mulai mengalami perubahan dan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi pada era digital dan milenial ini. Hampir setiap industri memanfaatkan penggunaan teknologi digital untuk memudahkan pekerjaan, termasuk masalah keuangan. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh sektor keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan bagi masyarakat luas adalah *Financial Technology (FinTech)*. Sektor pembayaran di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan FinTech tertinggi dan metode pembayaran menjadi salah satu faktornya. Metode pembayaran yang sangat populer di kalangan masyarakat umum saat ini adalah metode pembayaran digital (*cashless*). Berdasarkan Informasi yang dikutip dari Kata data (databoks.katadata.co.id) total pengguna internet di Indonesia per Januari 2021 adalah 202,6 juta mengalami peningkatan 15,5% atau 27 juta dari tahun sebelumnya. Mengacu pada jumlah penduduk Indonesia sebesar 274,9 juta, pemakai internet di Indonesia menggapai 73,7%. 345,3 juta orang menggunakan perangkat ini sebagai jumlah pengguna internet yang menggunakan perangkat *smartphone* Indonesia. Angka inipun mewakili 125,6% dari jumlah populasi. Seiring adanya peningkatan pengguna internet melalui *smartphone* tersebut, penggunaan metode pembayaran nontunai berbasis server di masyarakat juga semakin berkembang.

Cashless society merupakan evolusi sosial yang tidak dapat dihindarkan. Pemakaian uang tunai sebagai alat pembayaran dinilai menimbulkan kesulitan, terutama yang berkaitan dengan biaya penanganan uang tunai, masalah kesehatan,

adanya bahaya perampokan/pencurian, kenyamanan, dan peredaran uang palsu. Pada era transformasi digital ini, tuntutan kemudahan bertransaksi berdasarkan minat dan kebutuhan masyarakat sudah mulai mengubah sistem transaksi, yakni dari sistem bertransaksi uang tunai menuju sistem bertransaksi nontunai. Dengan menggunakan sistem berbayar nontunai, penipuan dan pencurian merajalela dapat dihindarkan sehingga pihak tertentu dapat berdagang tanpa harus membawa banyak uang. Kelebihan ataupun keuntungan sistem pembayaran nontunai ini adalah transaksi dapat terselesaikan dengan cepat sebab pengguna tidak perlu menyiapkan pecahan untuk ditukarkan dengan uang kembalian sehingga transaksi dapat diselesaikan dengan cepat. Ada berbagai model sistem pembayaran nontunai. Salah satu contoh atau model sistem pembayaran nontunai tersebut adalah dengan menggunakan QRIS.

QRIS merupakan standar pembayaran kode QR untuk sistem pembayaran Indonesia. QRIS diperkenalkan pada 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Pengenalan QRIS juga melambangkan tujuan Indonesia untuk sistem pembayaran pada tahun 2025. *Tagline* QRIS, UNGGUL (*Universal, Easy, Profit, dan Direct*) berjanji untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan mendorong UMKM. Hal ini dapat mendorong kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemakaian QRIS dimulai sejak tahun 2019. QRIS menjadi sistem pembayaran yang paling aman di masyarakat. Sistem pembayaran ini menjadi sangat diperlukan saat dunia dilanda pandemi Covid-19 pada awal 2020. Pada masa pandemi, masyarakat diharuskan melaksanakan social distancing. Bagi kaum

milennial, QRIS juga telah menjadi bagian dari tren gaya hidup mereka. Mereka tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak, cukup dengan telepon pintar (*smartphone*) sudah dapat melakukan transaksi dengan mudah melalui layanan scan QRIS pada aplikasi dompet digital dan *M-Banking* yang terpasang. Peningkatan pemakaian QRIS yang jauh melampaui target perluasan itu sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan peningkatan tersebut, akan terlihat implementasi penggunaan QRIS pada masyarakat secara luas.

Selain itu, peningkatan QRIS yang drastis tersebut terjadi secara tidak normal meskipun adopsi QRIS mengalami peningkatan. Namun, hal tersebut tidak selalu berdampak positif. QRIS disediakan dan dimanfaatkan oleh beberapa pelaku UMKM. Berdasarkan prapenelitian yang telah dilakukan, beberapa pelaku UMKM yang memanfaatkan QRIS belum mampu mengimplementasikan pemakaian QRIS sebagai metode pembayaran secara maksimal. Bank Indonesia pada tahun 2020 mewajibkan menggunakan QRIS. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penyebab peningkatan QRIS yang pesat tidak hanya dari keinginan masyarakat secara mandiri, tetapi hal ini juga didukung dengan adanya kewajiban dari Bank Indonesia untuk menerapkan QRIS. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang hendak menerapkan *QR code* wajib untuk mempraktikkan QRIS. Hal ini diatur dalam PADG Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk metode pembayaran. Menurut Anastasia Anggi Palupi (2022), penerapan penggunaan QRIS saat ini terus mengalami perkembangan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan keuangan inklusif serta memajukan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, pengguna QRIS telah menjangkau 13,4

juta merchant di seluruh Indonesia yang lebih didominasi oleh sektor UMKM sebesar 95% (Bank Indonesia, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Bali, yakni provinsi yang memiliki andil besar dalam mendukung adopsi QRIS sebagai terobosan baru dalam sistem pembayaran telah mencapai penghargaan Bank Indonesia Awards 2021 sebagai kategori pemerintah provinsi yang mampu mengimplementasikan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) paling baik di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Hal itu sejalan dengan peningkatan penggunaan QRIS sebesar 120% dibandingkan dengan awal tahun 2021. Jumlah tersebut didominasi oleh sektor UMKM yang mencapai 93,17%, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari katadata.co.id.

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang merupakan salah satu model dalam kegiatan perdagangan, biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan badan usaha yang lingkungannya lebih kecil (lebih dikenal dengan istilah mikro). Bagi pelaku usaha, UMKM adalah usaha atau usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki peran sangat penting dalam membangun kestabilan ekonomi Indonesia. UMKM terbukti tetap berdiri kokoh saat usaha-usaha besar berjatuh. Ada beberapa keunggulan UMKM, antara lain: (1) UMKM menghasilkan barang konsumsi atau jasa yang dekat dengan masyarakat; (2) UMKM cenderung tidak menggunakan bahan baku impor; dan (3) UMKM cenderung menggunakan modal sendiri tanpa ditopang pinjaman dari bank (Setiawan & Mahyuni, (2020). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022), UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama saat krisis. UMKM selamat dari krisis keuangan pada tahun 1998 dan

selama pandemi Covid-19. UMKM merupakan bagian dari kemandirian perekonomian Indonesia dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat ketiga peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan, dan sarana memperoleh devisa pemasukan bagi negara.

Perkembangan teknologi digital semakin pesat, terutama pasca pandemi Covid-19. Ini juga mendorong belanja online. Tidak mengherankan, platform elektronik laris manis dalam hal belanja dan bertransaksi. Menurut Perry Warjiyo (2022), selaku Direktur Utama Bank Indonesia, mengatakan transaksi di platform bisnis elektronik naik sekitar 12% menjadi Rp 30,8 triliun dibandingkan Februari tahun lalu. Transisi ini tentunya akan mendorong Bank Indonesia untuk mengembangkan program digital UMKM. Percepatan digitalisasi UMKM dilakukan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Harapannya adalah mendorong UKM yang lebih kuat melalui tiga pilar program pengembangan UMKM BI, yaitu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan perluasan pasar. Salah satu implementasi program dari tiga pilar pengembangan UMKM adalah melalui program digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM merupakan langkah BI untuk mengakselerasi pengembangan UMKM digital dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. E-commerce melibatkan penguatan keterampilan pemasaran digital dan pemasaran usaha kecil dan menengah ke pasar global melalui platform digital. Dukungan keuangan elektronik dalam bentuk aplikasi digital untuk UMKM (SI APIK) juga layanan pembayaran digital untuk memudahkan transaksi UMKM (QRIS UMKM).

Pemerintah terus berupaya memperbaiki keadaan ekonomi setelah diserang dampak pandemic, salah satunya dengan menyediakan sebuah inovasi keuangan digital melalui Qris, terciptanya inovasi ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperbaiki sistem pembayaran nontunai dan juga melalui peraturan PADG Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk metode pembayaran QRIS ini sangat disarankan untuk digunakan utamanya oleh UMKM, namun walaupun penggunaannya sudah diterapkan sejak tahun 2019 masih banyak para pelaku UMKM yang belum memanfaatkan QRIS ini secara optimal salah satu penyebabnya adalah masih relatif rendahnya jumlah UMKM, sebagai pelaku bisnis dengan jumlah besar, yang mengadopsi QRIS sebagai alat pembayaran (Mahyuni & Setiawan, 2021). Saksonova & Kuzmina-Merlino (2017) menemukan bahwa minimnya pengetahuan akan layanan pembayaran nontunai menjadi salah satu faktor yang menjelaskan rendahnya adopsi sistem pembayaran nontunai. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menggalakkan program digitalisasi UMKM, karena diyakini bahwa transformasi digital menjadi kunci penting untuk memulihkan dan membangkitkan UMKM pada masa pandemi. Jumlah UMKM yang telah terhubung dengan ekosistem digital mencapai 15,9 juta atau 24,9% dari total pelaku UMKM (Herman, 2021). Angka ini tentu saja menunjukkan masih banyak UMKM yang belum terhubung dengan platform digital atau belum maksimal dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dalam perkembangan bisnisnya salah satunya penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran.

Perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional (Hamid, 2010). UMKM merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran: (1) sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan.

Provinsi Bali adalah salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan pariwisata dan usaha-usaha kecil seperti UMKM. Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sangat besar. UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar. Oleh karena itu, keberadaan UMKM hendaknya terus diberdayakan. Dengan demikian diharapkan UMKM dapat berkembang menjadi lebih baik dan memacu tumbuhnya usaha-usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiryanto, 2012). Salah satu kabupaten yang memiliki jumlah UMKM terbanyak per tahun 2020 adalah Gianyar dengan jumlah 75.542, Karangasem dengan jumlah 57.456, dan yang ketiga adalah kabupaten Buleleng dengan jumlah 54.489 (Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali). Kabupaten Buleleng menempati urutan ketiga dengan jumlah UMKM terbanyak di Bali dengan persebaran di seluruh kecamatannya. Jumlah UMKM yang banyak maka perkembangan ekonomi

kabupaten buleleng banyak bergantung dengan perkembangan dari UMKM yang ada di setiap kecamatannya.

Tabel 1 Penurunan Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Tahun		Penurunan
		2020	2021	
1	Buleleng	115	69	46
2	Gerokgak	284	292	-
3	Sawan	71	27	44
4	Busungbiu	55	43	12
5	Banjar	34	37	-
6	Sukasada	59	37	22
7	Seririt	41	0	41
8	Kubutambahan	24	19	5
9	Tejakula	100	100	-

(Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UMKM Kabupaten Buleleng)

Berdasarkan table satu dapat diketahui bahwa UMKM di kabupaten Buleleng banyak mengalami penurunan di setiap kecamatannya. Dari tahun 2020 menuju tahun 2021 hanya 3 kecamatan yang jumlah UMKMnya mengalami peningkatan. Kecamatan Buleleng menjadi kecamatan yang paling tinggi jumlah penurunannya yaitu sebanyak 46 UMKM. Penurunan ini tentu saja berdampak pada perkembangan ekonomi daerah.

Perkembangan ekonomi di Kecamatan Buleleng bisa dibilang melambat, salah satu penyebab yang paling berpengaruh adalah adanya penurunan jumlah UMKM pada setiap tahunnya. Menurut Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Buleleng (2022) mengatakan UMKM di Kecamatan Buleleng turun secara signifikan. Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng berjumlah 153; pada tahun 2020, jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng berjumlah 115; dan pada tahun 2021, jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng berjumlah 69.

Hal ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi melambat dikarenakan oleh UMKM sangatlah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui terdapat 97 UMKM yang aktif dan telah memanfaatkan QRIS sejak pandemic sudah terjadi. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sari pemilik Warung Sari Rezeki diketahui bahwa beliau menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran karena pemanfaatan QRIS sangat memudahkan transaksi jual beli, pelanggan yang tidak membawa uang tunai akan dapat tetap berbelanja dengan memanfaatkan QRIS, penggunaan QRIS juga akan sangat memudahkan apabila ada pembeli yang melakukan pemesanan melalui aplikasi WhatsApp sehingga bisa langsung membayarnya melalui QRIS. Penggunaan QRIS juga sangat mudah dan tidak menimbulkan risiko dalam penggunaannya sehingga pedagang dapat focus pada pengembangan ekonomi usahanya tanpa khawatir adanya kesalahan dalam pembayaran maupun yang lainnya sehingga manfaat dan kemudahannya sangat dirasakan oleh Ibu Sari. Ibu Sari mulai menggunakan QRIS karena memperoleh saran dari salah satu pelanggannya yang kebetulan memanfaatkan QRIS untuk berbelanja, sehingga ibu Sari tertarik untuk menggunakan QRIS. Selain itu dengan menggunakan QRIS ibu Sari menjelaskan bahwa beliau lebih memahami terkait dengan literasi keuangan dan pengetahuan keuangan sehingga dapat mengembangkan usahanya.

Di Bali sendiri penggunaan QRIS memang didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Dikutip dari Bali.Bisnis.com (2021), Trisno Nugroho, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, mengatakan per 1 Oktober 2021 terdapat 330.282 merchant QRIS di Provinsi Bali. Dari jumlah tersebut, sebagian besar

pengguna QRIS merupakan pedagang dalam kategori usaha mikro dengan pangsa 52,7%. Tingkat penerapan QRIS berhubungan dengan akseptasi individu terhadap teknologi baru tersebut yang dipengaruhi oleh faktor tertentu. Berdasarkan *Technology Acceptance Model 3 (TAM 3)* yang disampaikan oleh Ayumi et al., (2020) dinyatakan bahwa minat menggunakan suatu teknologi dikontrol oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Dengan pemanfaatan QRIS UMKM telah bergabung dengan digitalisasi teknologi dan pengetahuan keuangan yang dapat memudahkan pengembangan ekonomi. Penggunaan QRIS oleh UMKM juga tidak hanya memudahkan penjual tetapi juga memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi.

Keberadaan QRIS tentu saja sudah dirasakan manfaatnya oleh penggunanya, manfaat yang diterima dengan menggunakan QRIS seperti menjadikan transaksi lebih mudah, cepat, dan mengikuti perkembangan zaman, terlindungi karena sudah pasti diawasi oleh bank serta memiliki izin, tidak perlu repot membawa uang tunai, mengurangi adanya risiko kerugian karena terdapat pemakaian uang palsu, mengurangi risiko pencurian, bisa menggunakan melalui aplikasi Dana, Gopay, Shopeepay, Ovo, dan lainnya yang mendukung potensi keberadaan QRIS. Persepsi manfaat ini tentu saja menjadi salah satu factor pendorong masyarakat dalam menggunakan QRIS dalam melakukan kegiatan transaksi. Manfaat yang ditawarkan uang elektronik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan penggunaannya. Ketika sebuah produk memiliki manfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemungkinan produk tersebut akan digunakan oleh masyarakat luas. Determinan persepsi manfaat merupakan sistem informasi yang memberikan wawasan sejauh mana seseorang

merasa bahwa penggunaan teknologi meningkatkan kinerja kerja. Bila dikaitkan dengan penggunaan QRIS, akan dianalisis seberapa bermanfaat atau bergunanya penggunaan QRIS ini oleh pelaku UMKM. Persepsi manfaat atau kegunaan menjadi suatu ukuran atau cara pandang pelaku UMKM, penggunaan suatu teknologi dapat dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya (Wiratama & Sulindawati, 2022). Jika persepsi manfaat terhadap suatu sistem semakin kuat, pelaku UMKM akan bersedia menggunakan sistem atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti QRIS sebagai sistem pembayaran dalam bertransaksi.

Selain kebermanfaatan, salah satu factor yang mempengaruhi minat penggunaan adalah persepsi kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan merupakan tingkat kepercayaan suatu individu saat memakai suatu teknologi yang akan dibebaskan dari suatu upaya (Laras Martyani Abdillah Al-Kusmami, 2022). Hal itu dimaksudkan bahwa jika suatu teknologi mampu memberi kemudahan bagi penggunanya, tentu akan menarik minat pengguna. Persepsi kemudahan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak (Wiratama & Sulindawati, 2022). Dengan dikembangkan aplikasi QRIS ini, para pelaku UMKM akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli dengan konsumen. Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kegiatan bertransaksi, diharapkan dapat meningkatkan biaya dan jumlah informasi yang tersedia akan berdampak signifikan terhadap niat untuk menggunakan pembayaran digital (Herdioko & Ni Kadek Dewi Damayanti, 2023). Menurut (Febriani et al., 2023) kemudahan penggunaan yang dirasakan mewakili harapan para pengguna bisnis atau pekerjaan ketika menggunakan sistem teknologi. Kemudahan ini dapat dibuktikan dengan lebih

mudahnya pekerjaan teknologi informasi dibandingkan dengan pekerjaan manual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anastasia Anggi Palupi, 2022) kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan kepada putusan bertransaksi saat menggunakan QRIS. Selaras dengan itu, penelitian yang dilaksanakan (Laloan et al., 2023) dan (Irmadhani & Nugroho, 2012) menguraikan bahwa kemudahan penggunaan memiliki dampak kepada minat pemakaian *e-money*. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian (H. A. Ningsih et al., 2020) yang mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan *internet banking*. Pendapat Ahmad searah dengan (Davis, 1989) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada minat konsumen dalam menggunakan QRIS.

Minat menggunakan QRIS juga dipengaruhi oleh saran atau rekomendasi yang diberikan oleh teman, tokoh penting dan juga konsumen ataupun pemerintah. Norma subjektif merupakan salah satu faktor pendorong yang berasal dari orang lain. norma subjektif memberikan pengaruh terkait minat individu dalam penggunaan QRIS saat melakukan suatu transaksi. Persepsi seseorang terkait dengan pilihan apakah mereka harus melakukan suatu tindakan atau tidak yang didasarkan oleh pertimbangan dan pendapat dari mayoritas orang yang mereka anggap penting. Maka diketahui bahwa norma subjektif merupakan salah satu factor yang akan mendorong minat penggunaan QRIS pada UMKM. Norma subjektif adalah pendapat individu yang memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan. Standar subjektif berupa pendapat seseorang yang dapat berkontribusi pada keyakinan orang lain yang membuat orang lain itu membuat keputusan

tertentu tentang objek, ide, visi, produk, layanan, atau hal lain yang dianggap memenuhi. Menurut Mahyarni (2013) norma subjektif mengacu pada persepsi individu yang muncul dari persepsi orang lain dan yang dia putuskan apakah akan melakukan tindakan tertentu atau tidak. Norma subjektif juga dapat ditentukan oleh keyakinan tentang pengetahuan atau preferensi yang muncul dari kepercayaan pada atasan, orang tua, kerabat, teman, kolega, yang membenarkan tindakan sedemikian rupa sehingga harus membuat keputusan tertentu (Susanto & Sahetapy, 2021). Dapat dikatakan bahwa norma subjektif adalah tindakan yang muncul dari keyakinan seseorang dan dipengaruhi oleh informasi dari orang lain, media dan iklan yang diyakininya. Komponen norma subyektif meningkatkan pentingnya pengaruh sosial di sekitarnya sehingga hal ini menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan tentang aktivitas penggunaan QRIS. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karniawati et al., (2021) yang menemukan adanya persepsi manfaat dan persepsi kegunaan penggunaan QRIS. Widowati & Khusaeni (2022) mengungkapkan bahwa minat masyarakat menggunakan QRIS juga dipengaruhi oleh adanya beragam tawaran promo, diskon, dan cashback dari para merchant pengguna QRIS.

Hal yang mendorong minat penggunaan QRIS lainnya adalah literasi keuangan. Susanto & Sahetapy (2021) menjelaskan bahwa literasi keuangan mengacu pada keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan yang terinformasi dan terefektif dengan menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia. Pengambilan keputusan keuangan yang tepat merupakan keputusan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang yang memiliki konsekuensi keuangan jangka panjang. Mengelola keuangan perusahaan

bukanlah hal yang mudah. Karena kebutuhan keuangan yang sangat kompleks, pelaku UMKM harus membuat keputusan besar. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mewajibkan operasional bank untuk mengelola penyaluran kredit dan peningkatan kapasitas usaha mikro dan UMKM. Literasi keuangan memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep keuangan, keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman ini untuk membuat keputusan yang efektif dalam konteks keuangan yang berbeda dan meningkatkan kesejahteraan UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anastasia Anggi Palupi, 2022) menjelaskan bahwa secara simultan maupun parsial variabel literasi keuangan dan kemudahan penggunaan sistem QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan QRIS.

Berdasarkan uraian diatas mengenai fenomena, latar belakang dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai penggunaan QRIS pada UMKM, menunjukkan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan QRIS pada UMKM. Dengan hasil penelitian terdahulu yang masih beragam disebabkan karena perbedaan penggunaan metode, teori, proksi, atau data dalam penelitian tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan variabel independen seperti persepsi manfaat, Persepsi kemudahan, Norma Subjektif dan Literasi Keuangan dengan variabel terikat adalah penggunaan QRIS pada UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan hasil bukti yang empiris terkait penelitian terdahulu yang sejenis. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Penggunaan QRIS oleh UMKM di Kecamatan Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada jabaran latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada sebagai berikut.

1. Perkembangan teknologi mendorong perubahan pada gaya hidup terutama dalam sistem pembayaran yang mendorong UMKM untuk ikut terjun dalam penggunaan QRIS.
2. UMKM di Kecamatan Buleleng mengalami penurunan jumlah dalam 3 tahun terakhir.
3. Hanya 24,9% UMKM yang baru bergabung di platform digital, sehingga banyak yang belum mengetahui dan bergabung dengan Platform digital sehingga masih awam dengan perkembangan teknologi salah satunya terkait dengan QRIS.
4. Awamnya pelaku UMKM pada dunia digital menyebabkan pelaku UMKM belum mengetahui kebermanfaatan dan kemudahan Penggunaan QRIS, Sehingga penggunaan QRIS di UMKM belum dapat optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan pengidentifikasian permasalahan penelitian, penelitian ini difokuskan pada topik pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, norma subjektif, dan literasi keuangan terhadap penggunaan sistem pembayaran QRIS oleh UMKM di Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut.

1. Apakah persepsi manfaat berpengaruh positif signifikan terhadap

penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng?

2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng?
4. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah berikut ini.

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng.
4. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) oleh UMKM di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yakni berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai perkembangan teori yang berhubungan dengan determinan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh pelaku UMKM. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, norma subjektif, dan literasi keuangan terhadap penggunaan QRIS

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan untuk menggunakan QRIS dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga sesuai dengan perkembangan era digital.
- b. Bagi pemerintah, dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat kebijakan yang dapat membantu, mendukung, dan mendidik serta melatih UMKM untuk menjadi UMKM yang berliterasi digital dan modern dalam melakukan kegiatan usahanya.
- c. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan kajian penelitian relevan terkait permasalahan determinan penggunaan QRIS.